

No : B-14/PM.00.02/K.SB-04/06/2026 Tanjung Pati, 22 Juni 2026  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Himbauan Pelaksanaan  
Pemutakhiran Data Partai Politik  
secara Berkelanjutan melalui Sipol  
Semester I Tahun 2026

Kepada Yth :

**Ketua KPU Kab. Lima Puluh Kota**

di-

Tempat

#### A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### B. Himbauan

Dalam rangka menjaga keakuratan dan kemutakhiran data kepengurusan Partai Politik di tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota, bersama ini Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota menyampaikan himbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota terkait pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol Semester I Tahun 2026 untuk memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi serta menyampaikan informasi tentang pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol;
2. Memberikan pelayanan dan fasilitasi konsultasi terkait pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol serta penggunaannya kepada Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Melakukan verifikasi dan penetapan terhadap Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sipol;

4. Mengumumkan hasil pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dan menyampaikan hasil pemutakhiran kepada Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikian himbauan ini disampaikan dan atas kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih

KETUA,



YORIZA ASRA

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi di Padang;
2. Arsip